

# BAB I

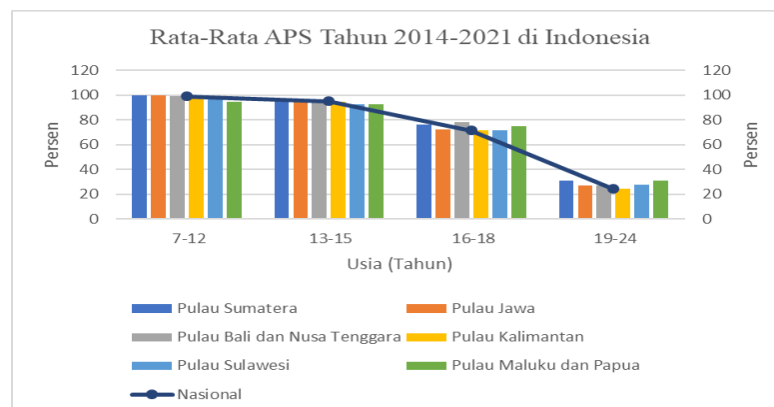
## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah salah satu sumber modal yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk mendorong produktivitas pembangunan, SDM dapat diwujudkan sebagai modal manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Dalam teori *Human Capital* yang dijelaskan oleh Becker (1965) bahwa bagian dari investasi *human capital* yang sangat penting yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas sehingga pembangunan nasional dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih layak melalui pendidikan, dimana nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Persentase partisipasi penduduk yang bersekolah menunjukkan salah satu bentuk peningkatan mutu dan ketersediaan sarana pendidikan di suatu wilayah. Untuk melihat seberapa besar majunya bidang pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah atau selanjutnya disebut APS. (Silviliyana, Maylasari, Agustina, Dewi, & Sulistyowati, 2019).

**Grafik 1. Rata-Rata APS Tahun 2014-2021 di Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Dilihat dari Grafik 1 dapat diketahui rata-rata APS kelompok umur 16-18 cenderung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata APS golongan umur 7-12

Fiona Virdam, 2023

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PADA PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tahun dan 13-15 tahun. Besaran nilai APS pada setiap pulau berbeda karena adanya perbedaan dalam kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, SDA dan SDM, serta kebijakan atau peraturan pemerintah setempat sehingga terjadinya perbedaan angka partisipasi sekolah tiap daerah.

**Grafik 2. Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah dan Laju Pertumbuhan PDRB di Indonesia Tahun 2014-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Pemerintah Indonesia berupaya memajukan pendidikan yaitu dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun, melalui tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMA sederajat pada seluruh wilayah Indonesia. Namun, rata-rata APS umur 16-18 memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata APS umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Di lihat pada grafik 2. di atas rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap pulau berbeda. Pada 6 pulau yang tertera, Pulau Sulawesi pada tahun 2014-2021 memiliki rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) terendah hanya sebesar 72,43%. Pulau Sulawesi termasuk kawasan Indonesia tengah. Selain itu, pada pertumbuhan PDRB di Pulau Sulawesi pada tahun 2014-2021 cenderung

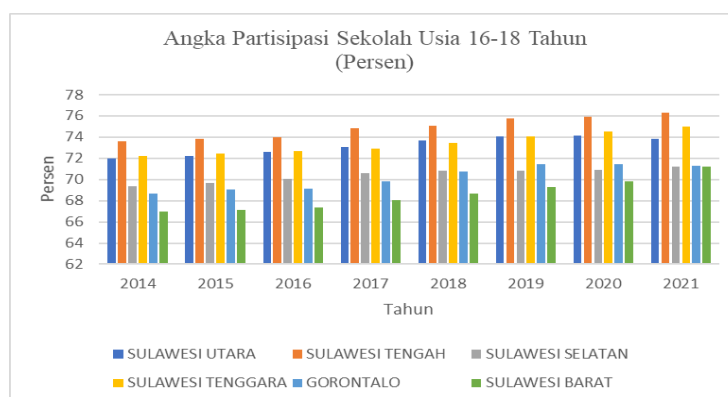
tinggi dan adanya kenaikan pada setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan PDRB di pulau Sulawesi dari tahun 2014 hingga 2021 sebesar 6,4%.

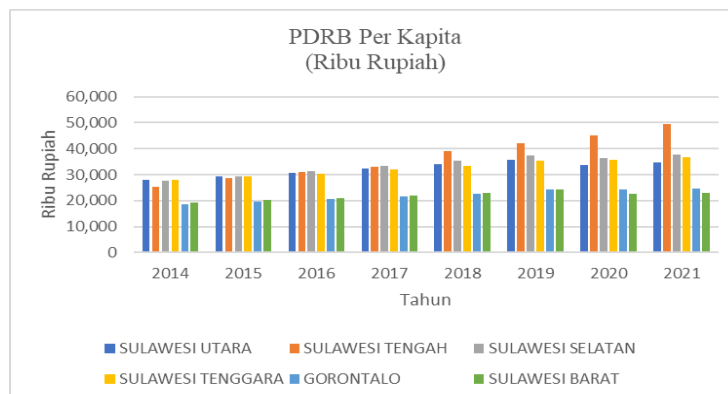
Laju pertumbuhan PDRB adalah bagian dari indikator makro ekonomi yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu (Pemerintah Kabupaten Asmat, 2015). Dalam hal ini, Pulau Sulawesi dengan laju pertumbuhan PDRB yang terus meningkat dan cenderung tinggi seharusnya mempunyai partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga tinggi karena mempunyai kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan (Suwandana, 2018), tetapi kenyataannya tidak demikian. Fenomena inilah yang mendasari peneliti untuk memilih seluruh provinsi di Pulau Sulawesi sebagai lokasi penelitian.

Partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan sebagai salah satu investasi modal manusia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dalam penelitian (Sartiyah, Hartoyo, Syaikat, & Oktaviani, 2017) rendahnya pendapatan membuat masyarakat sulit dalam meraih fasilitas pendidikan, kemiskinan yang tinggi juga dapat jadi salah satu penyebab sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak (Rahmatin & Soejoto, 2017).

Selain itu, jumlah sekolah juga memiliki peran sebagai salah satu fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menempuh pendidikan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat (Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, 2020). Berdasarkan hal-hal di atas, berikut grafik yang dapat memperlihatkan perkembangan faktor-faktor sebagai berikut.

**Grafik 3. Angka Partisipasi Sekolah dan PDRB per Kapita Pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021**





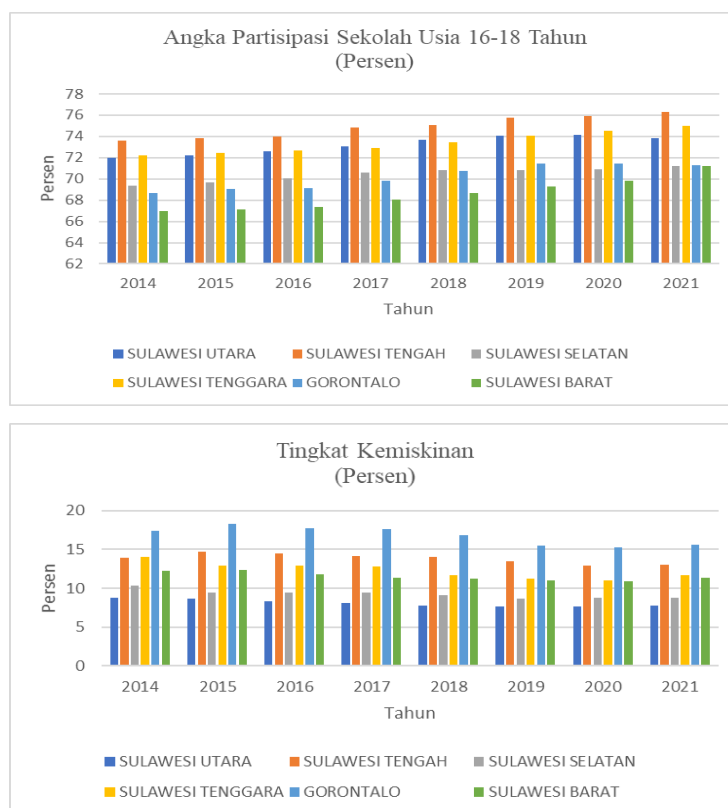
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Pada Grafik 3 dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, peningkatan ini lumayan cepat sebesar lebih dari 4% di setiap tahun nya, besarnya PDRB per kapita di setiap provinsi memiliki perbedaan satu sama lain. PDRB per kapita merupakan bagian dari gaji atau penghasilan yang di dapatkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan produktivitas pada pekerjaan yang dimiliki individu. Smith (1723-1790) berpendapat bahwa dalam pekerjaan yang sulit, upah nya akan lebih tinggi. Pekerjaan yang sulit tersebut dapat dipelajari melalui pendidikan, termasuk bersekolah karena tantangan pekerjaan harus dipelajari sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan secara tidak langsung dapat mendorong tercapainya gaji atau penghasilan lebih meningkat.

Pendapatan per kapita dapat menunjukkan keadaan ekonomi seseorang dimana besarnya penghasilan yang diperoleh maka APS akan meningkat karena mereka mampu memenuhi kebutuhan sektor pendidikan untuk pemenuhan partisipasi sekolah, namun hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan grafik 3. di atas PDRB per kapita pada tahun 2021 Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan yang semula 24.313 naik menjadi 24.650 hal tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan yang terjadi hampir diseluruh kategori. Pertumbuhan tertinggi ada pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori jasa keuangan dan asuransi (Gorontalo, 2022). Kenaikan PDRB per kapita di Provinsi Gorontalo pada 2021 tidak diikuti naiknya APS melainkan APS di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengalami penurunan 0,13% yang semula pada tahun 2020 71,43% menjadi 71,3% pada tahun 2021. Penurunan APS terjadi karena siswa pada

jenjang sekolah menengah rentan tidak melanjutkan atau putus sekolah karena merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah diperoleh dan memilih mencari kerja (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Kemampuan masyarakat tidak hanya tercermin dari PDRB per kapitanya saja, melainkan dapat terlihat juga pada tingkat kemiskinan. Berikut grafik perkembangan tingkat kemiskinan.

**Grafik 4. Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021**



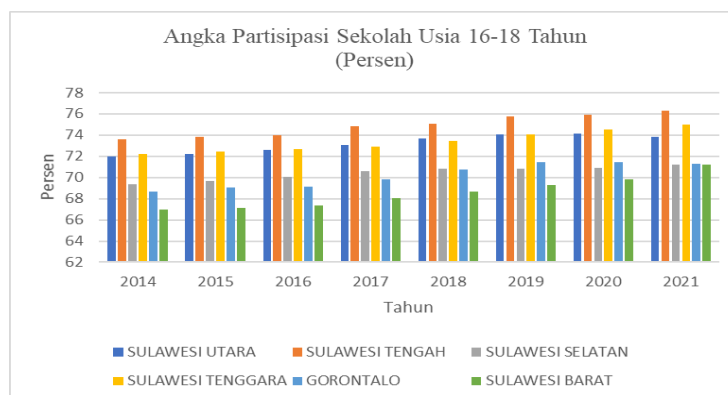
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Pada Grafik 4. diatas terlihat bahwa disetiap provinsi cenderung mampu menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya pada tahun 2014-2020 dengan rata-rata penurunan 0,5%, namun pada tahun 2021 terlihat bahwa setiap provinsi yang ada mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,3%. Tingkat kemiskinan yang tinggi masih dialami di beberapa provinsi. Menurut Nurkse, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat hidup miskin dengan penghasilan yang sedikit dan secara tidak langsung dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi pendidikan pada akhirnya dapat menurunkan produktivitasnya, namun hal ini tidak terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 kemiskinan di Provinsi

Sulawesi Tengah terjadi peningkatan 0,08%. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92% dan pada tahun 2021 naik menjadi 13%, tingginya kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 masih diatas kemiskinan nasional. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh komoditi makanan mencapai 76,68% sedangkan komoditi bukan makanan mencapai 23,32% (Wiranata, 2021). Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah tidak membuat masyarakat putus asa dalam menempuh pendidikan, hal ini terlihat dari naiknya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 ke 2021. Pada Grafik 4. di atas terjadi kenaikan Angka Partisipasi Sekolah yang semula pada tahun 2020 sebesar 75,89% naik 0,43% menjadi 76,32% pada tahun 2021. Semangat serta kemauan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam melanjutkan pendidikan dapat di bilang cukup besar karena Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2021 lebih tinggi 3,23% dari APS nasional. Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam meningkatkan partisipasi sekolah dengan memberi beasiswa pada masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian selain PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan, tujuan peningkatan partisipasi sekolah khususnya untuk masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan bangunan atau gedung sekolah yang disediakan pemerintah yakni perencanaan berdirinya sekolah-sekolah baru. Berikut grafik perkembangan jumlah sekolah tingkat pendidikan SMA/SMK yang sebagian besar ada pada kalangan umur 16-18 tahun.

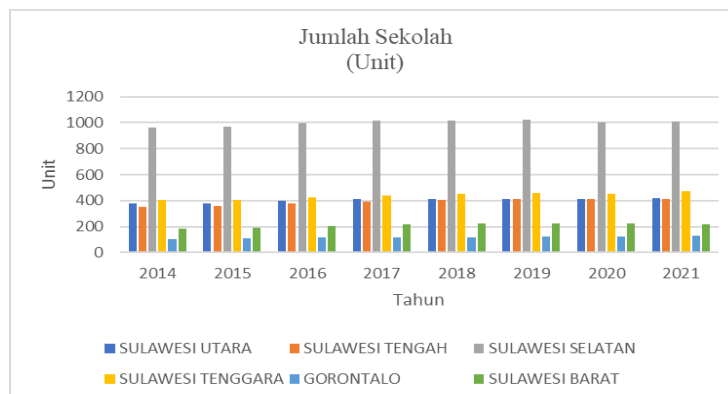
**Grafik 5. Angka Partisipasi Sekolah dan Jumlah Sekolah Tingkat Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2021**



Fiona Virdam, 2023

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PADA PROVINSI DI PULAU SULAWESI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Pada Grafik 5. di atas terlihat bahwa dari tahun 2014-2021 jumlah sekolah di setiap provinsi bertambah dan ada juga yang berkurang. Neilson dan Zimmerman (2014) berpendapat bahwa membangun sekolah di wilayah miskin dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan upaya dalam penyediaan sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang dekat dapat memicu partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Rahmatin & Soejoto, 2017). Menurut Johri cara peningkatan partisipasi sekolah khususnya pada masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan bangunan atau gedung sekolah. Gedung sekolah berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Proses berlangsung nya pendidikan disekolah sangat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, termasuk gedung sekolah (Parmo, Sucipto, & Sumarkan, 2016).

Pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah sekolah terbanyak diantara provinsi lain yang ada. Jumlah sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebanyak 1.011 unit dan APS nya pada tahun yang sama hanya 71,21%. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 jumlah sekolah hanya 411 unit namun APS nya sebesar 76,32%. Sedikitnya jumlah sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah tidak membuat masyarakatnya putus asa dalam menempuh pendidikan, maka dari itu partisipasi sekolah di Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tinggi dan jumlah sekolah yang ada mampu mewadahi masyarakat usia sekolah.

Penelitian mengenai APS telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian (Sartiyah, Hartoyo, Syaikat, & Oktaviani, 2017), mengungkapkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS. Selanjutnya, hasil dari

penelitian (Karini, 2018) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap APS. Hasil penelitian (Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, 2020) mengungkapkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap APS.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijabarkan, ditemukan permasalahan yaitu adanya ketidaksamaan teori dengan data yang ada, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

APS merupakan gambaran banyak penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah yang memanfaatkan sarana dan prasaran pendidikan, tetapi selama tahun 2014-2021 APS tingkat Provinsi di Pulau Sulawesi cukup berfluktuasi. Rendahnya PDRB per kapita membuat masyarakat sulit dalam meraih fasilitas pendidikan serta kemiskinan yang tinggi dapat jadi salah satu hambatan individu dalam menyambung pendidikan. Di sisi lain jumlah sekolah yang tidak tersebsar secara rata dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakatnya di beberapa Provinsi dalam Pulau Sulawesi turut menjadi peyebabnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi di Pulau Sulawesi.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan membawa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta untuk peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait faktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan hal yang memiliki manfaat dalam pengimplementasian pengetahuan peneliti terkait permasalahan Angka Partisipasi Sekolah khususnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permasalahan tersebut.

- b. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran sehingga dapat jadi salah satu masukan serta pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan guna terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan SDM yang ada dapat menjadi modal berkualitas yang dapat memberi kontribusi dalam pembangunan Negara.

- c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah dan diharapkan dapat membuat masyarakat sadar dalam melanjutkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.